KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pelaku Kunker fiktif mesti disanksi
Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1-9

Pelaku Kunker Fiktif DPR Mesti Disanksi

DESSY SUCIATI SAPUTRI,
FAUZIAH MURSID

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim telah membaca hasil telaah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait buruknya laporan penggunaan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPR. Menurut Wapres, legislator yang serampangan membuat laporan semestinya dijatuhi sanksi.

Dalam laporan BPK tersebut, JK menjelaskan, memang tampak kecenderungan laporan anggaran kunker dibuat oleh staf khusus anggota dewan. "Kadang yang buat staf khususnya, (mereka yang) datang, padahal yang dibutuhkan anggota DPR-nya sendiri," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (13/5).

Laporan-laporan yang tak jelas dari para anggota dewan, sambung dia, kemudian berpotensi menimbulkan kunker fiktif yang ujung-ujungnya berpotensi merugikan negara. Sebab itu, mesti ada sanksi terhadap anggota DPR yang tak membukukan laporan anggaran kunker. "Kalau tidak memenuhi itu, harus ada sanksinya, baik dari fraksinya atau dari DPR sendiri," kata dia.

JK menegaskan, seluruh perjalanan dinas harus memiliki laporan perjalanan. Laporan perjalanan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni memberikan bukti laporan kunjungan kerja dan memberikan laporan hasil kunjungan, baik itu melalui bukti teken dari pejabat daerah yang dikunjungi, kelompok masyarakat terkait, maupun melalui gambar foto.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga mempersilakan BPK menindak para anggota dewan yang terbukti melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif. "Kalau ada yang ketahuan, tangkap saja," kata Zulkifli di Kota Batu, Malang, kemarin. Politikus PAN ini enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai dugaan kunker fiktif tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz mengiyakan, lembaganya tengah mengaudit laporan kunker para anggota dewan. Hal tersebut menyusul temuan audit bahwa banyak kunker yang tak dilaporkan atau dilaporkan menggunakan data-data yang serampangan.

Atas temuan itu, BPK meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk mendesak para anggota dewan ataupun fraksi melengkapi laporan. Harry, yang juga merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut, menambahkan, penelusuran BPK bukan berarti ada penyalahgunaan anggaran. Kendati demikian, bila sampai akhir Mei laporannya tak bisa dilengkapi, BPK bisa menganggap kunker-kunker tersebut bermasalah.

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Pelaku Kunker Fiktif DPR Mesti Disanksi ..... *dari hlm 1*

Perihal penelusuran BPK tersebut terkuak lewat surat internal Fraksi PDIP yang beredar di kalangan wartawan. Surat itu memerintahkan anggota Fraksi PDIP membenahi laporan karena BPK menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 945 miliar dari pengunaan dana yang tak dilaporkan oleh anggota dewan. Jumlah itu nyaris setara dengan total anggaran APBN untuk biaya kunker anggota dewan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengungkapkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR saat ini sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Sebab, menurut dia, kewenangan untuk mengawasi laporan keuangan setiap anggota dewan berada pada masing-masing fraksi.

Fraksi kemudian menyerahkan laporan tersebut pada Setjen DPR. "Jadi, BPK periksa ke Setjen, tapi laporan anggota kepadanya fraksi-fraksi. Sekarang Setjen *ngumpulin* laporan fraksi-fraksi," kata Winantuningtyastiti seusai bersaksi untuk anggota DPR yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK tersebut belum selesai dan masih harus mengumpulkan data-data. Oleh karena itu, dengan dikumpulkannya seluruh laporan kegiatan tersebut, ia berdalih angka temuan tersebut bakal berkurang. "Kita *ngumpulin* laporan-laporan anggota supaya berkurang, angka (temuan) yang *temen-temen* rilis itu," kata dia. Meski demikian, menurut Winantuningtyastiti, sebelum BPK merilis adanya potensi kerugian negara, beberapa anggota DPR telah menyerahkan laporan terkait kunjungan kerja.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, isu kunjungan kerja fiktif DPR hingga kini masih sebatas dugaan. Hal itu, katanya, masih harus diteliti lebih lanjut apakah memang benar terjadi atau tidak. "Apakah memang benar begitu, apakah itu hanya karena kawan-kawan belum melaporkan, misalnya, atau mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Hidayat mengingatkan, dugaan kunker fiktif juga sedianya belum resmi diungkapkan BPK. Sebab itu, ia enggan menilai bahwa telah terjadi perampokan uang negara di DPR. Bagaimanapun, Hidayat mengingatkan rekan-rekannya di DPR agar melaksanakan reses sebagaimana mestinya. Ia kemudian mengklaim, PKS sudah terbiasa mentradisikan pelaporan itu. PKS akan menaati apa yang menjadi ketentuan reses dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan reses itu. ■ qommarria rostanti/christyaningsih **ed:** fitriyan zamzami

PERPUSTAKAAN DPR-RI